

DYNAMIC GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Maudy Fatimah¹⁾ Budi Hasanah²⁾ Ahmad Sururi³⁾

^{1,2,3} Universitas Serang Raya

Corresponden Author: maudyfatimah20@gmail.com,

ABSTRACT

The complexity of problems such as traditional local culture, low education factors and lack of community motivation are some of the problems that must be faced by the Serang City Government in implementing the BPNT program for KPM in Kasemen District, Serang City. The purpose of this study is to discuss the implementation of the BPNT program for KPM in Kasemen District, Serang City based on dynamic governance analysis. This study used a case study approach and informant retrieval was carried out by purposive sampling through interview and observation data collection techniques. The data were analyzed using the process of data classification, labeling and category arrangement based on research questions and interview transcripts for further data analysis. The results showed that the implementation of the BPNT program for KPM in Kasemen District, Serang City has not been fully implemented effectively and based on dynamic governance analysis, it is necessary to strengthen culture, capabilities and the three cognitive abilities as well as encourage effective government support, social capacity and public private partnerships. efforts to recommend policies in the BPNT program for KPM in Kasemen District, Serang City.

Keywords: Non-Cash Food Aid Program, Dynamic Governance

ABSTRAK

(Kompleksitas permasalahan seperti budaya tradisional lokal, faktor pendidikan yang rendah dan kurangnya motivasi masyarakat menjadi beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan program BPNT untuk KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas implementasi program BPNT untuk KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang berdasarkan analisis tata kelola dinamis. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling melalui teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan proses klasifikasi data, pelabelan dan penyusunan kategori berdasarkan pertanyaan penelitian dan transkrip wawancara untuk analisis data selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPNT untuk KPM di Kabupaten Kasemen Kota Serang belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan berdasarkan analisis tata kelola yang dinamis maka perlu dilakukan penguatan budaya, kapabilitas dan ketiga kemampuan kognitif serta mendorong pemerintahan yang efektif. dukungan, kapasitas sosial dan kemitraan publik swasta. upaya merekomendasikan kebijakan dalam program BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Kata Kunci: Program Bantuan Pangan Non Tunai, Tata Kelola Dinamis

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan sosial paling umum di Indonesia adalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2020 tercatat sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang dibandingkan dengan bulan Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang dibandingkan bulan September 2019. Persentase penduduk miskin perkotaan pada bulan Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada bulan September 2020. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada bulan Maret 2020 sebesar 12,82 persen, naik menjadi 13,20 persen pada bulan September 2020 (BPS Indonesia, 2020). Peningkatan angka rumah tangga kemiskinan tersebut sebagian besar berasal dari sector pertanian (BPS Indonesia, 2020).

Kemiskinan dimaknai sebagai suatu kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan individu dan rumah tangga dalam mengakses sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Nallari & Griffith, 2011) dan dampak kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat secara luas diantaranya meliputi minimnya akses mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Oleh sebab itu mendorong berbagai kebijakan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai perwujudan kehadiran negara bagi masyarakat.

Upaya Pemerintah dalam menangani permasalahan kemiskinan dilakukan dengan menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Presiden No 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan dibentuknya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu program yang sudah dibentuk untuk menanggulangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui rekening bank yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (Elektronik Gotong Royong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BNI dan BTN.

Beberapa kota di Indonesia yang masih memiliki angka kemiskinan tertinggi adalah Kota Serang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten. Menurut data BPS Provinsi Banten, Kota

Serang merupakan kota yang memiliki garis kemiskinan tertinggi dibandingkan tiga kota lainnya yaitu: Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Namun demikian angka ini menurun dimulai dari periode Maret 2019 hingga September 2019, jumlah penduduk miskin turun hingga 7,5 ribu penduduk. Dan berikut adalah persentase penduduk miskin menurut kota di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2013-2019.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kota di Provinsi Banten, 2013-2019

Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kota (Persen)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Tangerang	5.26	4.91	5.04	4.94	4.95	4.76	4.43
Kota Cilegon	3.99	3.81	4.1	3.57	3.52	3.25	3.03
Kota Serang	5.92	5.7	6.28	5.58	5.57	5.36	5.28
Kota Tangerang Selatan	1.75	1.68	1.69	1.67	1.76	1.68	1.68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa bahwa Kota Serang merupakan kota yang angka kemiskinannya tertinggi dibanding tiga kota lainnya di Provinsi Banten. Pada tahun 2019 angka kemiskinan di Kota Serang menginjak angka sebesar 5.28%, angka ini sebenarnya sudah turun dibandingkan pada tahun 2018 yang menginjak angka 5.36%. Sedangkan angka kemiskinan terendah di Provinsi Banten dipegang oleh Kota Tangerang Selatan yaitu 1.68%, angka kemiskinan di Kota Tangerang Selatan termasuk stabil dari tahun ke tahun. Data Terbaru angka kemiskinan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2020 sebesar 5.92% mengalami peningkatan 0.64% poin dibanding periode sebelumnya.

Selanjutnya terkait dengan program BPNT yang dilaksanakan di Kota Serang, berdasarkan data Dinas Sosial Kota Serang yang telah bekerja sama dengan bank yang ditunjuk, tercatat total jumlah penerima BPNT di Kota Serang per-Desember 2019 sebanyak 13.873 KPM. Jumlah penerima KPM setiap bulannya selalu ada *upgrading*, bisa berkurang atau bertambah. Berikut adalah data penerima program BPNT di Kota Serang yang tersebar di enam kecamatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Penerima Bantuan Pangan Nontunai Di Kota Serang Pada Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah KPM
1	Serang	2329
2	Cipocok Jaya	1628
3	Kasemen	5373
4	Taktakan	1268
5	Curug	1671
6	Walantaka	1604
	Total	13.873

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Serang

Berdasarkan tabel 2, Kecamatan Kasemen memiliki jumlah KPM terbanyak yaitu sebesar 5373. Sedangkan Kecamatan Serang berada di posisi kedua yaitu 2329 KPM, dan kecamatan dengan jumlah KPM terendah yaitu Kecamatan Walantaka. Locus penelitian ini hanya akan menganalisis Kecamatan Kasemen dikarenakan tingginya jumlah KPM dan merupakan kantongnya kemiskinan di Kota Serang (Tribun Banten, 2020). Hasil observasi yang dilakukan pada tahun 2015 ditemukan fakta bahwa daerah Kasemen bisa dinilai miskin dan atau terbelakang karena kondisi lingkungannya tidak berkembang sebagaimana bagian kota lainnya, bahkan cenderung masih bersifat semirural. Rumah tangga miskin atau RTM di wilayah Kasemen tercatat sebanyak 5.934 RTM (Lan et al., 2018). Berikut ini adalah data penerima BPNT di Kecamatan Kasemen tahun 2019-2020.

Tabel 3. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Kasemen Tahun 2019-2020

No	Kelurahan	Jumlah KPM	
		2019	2020
1	Kasemen	502	543
2	Warung Jaud	616	758
3	Mesjid Priyayi	456	558
4	Bendung	553	614
5	Terumbu	389	459
6	Sawah Luhur	399	453
7	Kilasah	669	717
8	Margaluyu	512	526

9	Kasunyatan	471	546
10	Banten	809	869
Total KPM		5.373	6.043

Sumber: Kantor Dinas Sosial Kota Serang, 2020

Berdasarkan tabel 3 di atas penerima BPNT Kecamatan Kasemen pada tahun 2020 angkanya meningkat menjadi 6.043 dibandingkan tahun 2019 yakni 5373. Pada tahun 2019 penerima BPNT di Kelurahan Kasemen berjumlah 502 KPM. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penerima BPNT meningkat menjadi 543 KPM. Angka tersebut meningkat karena bertambahnya warga masyarakat yang membutuhkan BPNT untuk kelangsungan hidup dan pada saat ini terjadi PHK masal sejak masuknya pandemic COVID-19 yang mulai menyebar pada bulan April 2020 di Kota Serang dan sekitarnya.

Selain itu terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi Program BPNT Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Kasemen seperti budaya masyarakat yang masih tradisional dan antipati terhadap program-program pembangunan pemerintah, rendahnya pendidikan masyarakat dan minimnya motivasi masyarakat dalam menerima program-program pembangunan. Oleh sebab itu, kami berpandangan, pemerintah Kota Serang dalam konteks kebijakan harus melakukan penyesuaian dan pendekatan kebijakan yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama dalam implementasi Program BPNT Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Salah satu pendekatan kebijakan yang diharapkan mampu mewujudkan keberhasilan implementasi program BPNT bagi KPM di Kelurahan Kasemen adalah pendekatan *dynamic governance*, yaitu suatu kebijakan yang mendukung adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan yang terus menerus terjadi sehingga suatu masalah bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang dinamis (Sururi et al., 2019). *Dynamic governance* merupakan pendekatan yang terus menerus mengalami perubahan dan menekankan pada tiga kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah yaitu : Pertama, *think ahead* - kemampuan menganalisa kondisi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dari lingkungan eksternal dengan melihat peluang-peluang baru dan potensi ancaman yang ada; Kedua, *think again* kemampuan mengevaluasi dan mengidentifikasi perubahan kebijakan yang telah ditetapkan agar memperoleh hasil dan kualitas yang lebih baik; Ketiga, *think across* - kemampuan melintasi batas-batas tradisional untuk “berpikir diluar batas”, juga untuk “belajar dari orang lain” apabila terdapat ide-ide bagus yang

dapat diadopsi dan diadaptasi sebagai inovasi baru dalam pembuatan kebijakan (Neo & Chen, 2007)

Beberapa penelitian tentang program BPNT bagi KPM sudah dilakukan diantaranya oleh (Pathony & Deda, 2020) yang menunjukkan dalam hasil penelitiannya bahwa penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan (Fadlurrohman et al., 2020), kemudian (Pramessti et al., 2019) dalam penelitiannya menyimpulkan implementasi BPNT melalui E-Warong di kota Tanjungpinang sudah optimal, hanya saja masih terdapatnya saldo dari KPM yang kosong. Serta kurang berdayanya KPM dalam menjalankan program E-Warong karena harus bersaing dengan pihak swasta yakni agen Bank himbara (BNI).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Yunus, 2019) menyebutkan bahwa faktor penentu implementasi program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat sedangkan (Aspar et al., 2020) mengatakan bahwa bantuan non tunai yang dirasakan sangat membantu oleh para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) guna memenuhi kebutuhan dasar pangan di dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya kemudian adalah bantuan tersebut, dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam jangka waktu perbulannya serta adanya berbagai hambatan-hambatan lainnya.

Beberapa penelitian yang telah diuraikan membahas tentang implementasi BPNT bagi KPM dalam berbagai perspektif, akan tetapi penelitian tentang implementasi BPNT berdasarkan pendekatan *dynamic governance* belum dilakukan secara mendalam. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan implementasi BPNT bagi KPM berdasarkan pendekatan *dynamic governance* sebagaimana dikemukakan oleh (Neo, Boon Siong & Chen, 2007) yang meliputi budaya dan kapabilitas sector public serta tiga kemampuan kognitif yang harus dimiliki yaitu *think ahead* (kemampuan pemimpin untuk berfikir kedepan dan antisipatif), *think again* (kemampuan pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran) dan *think across* (kemampuan pemimpin yang mampu berfikir secara lateral, horizontal dan lintas disiplin).

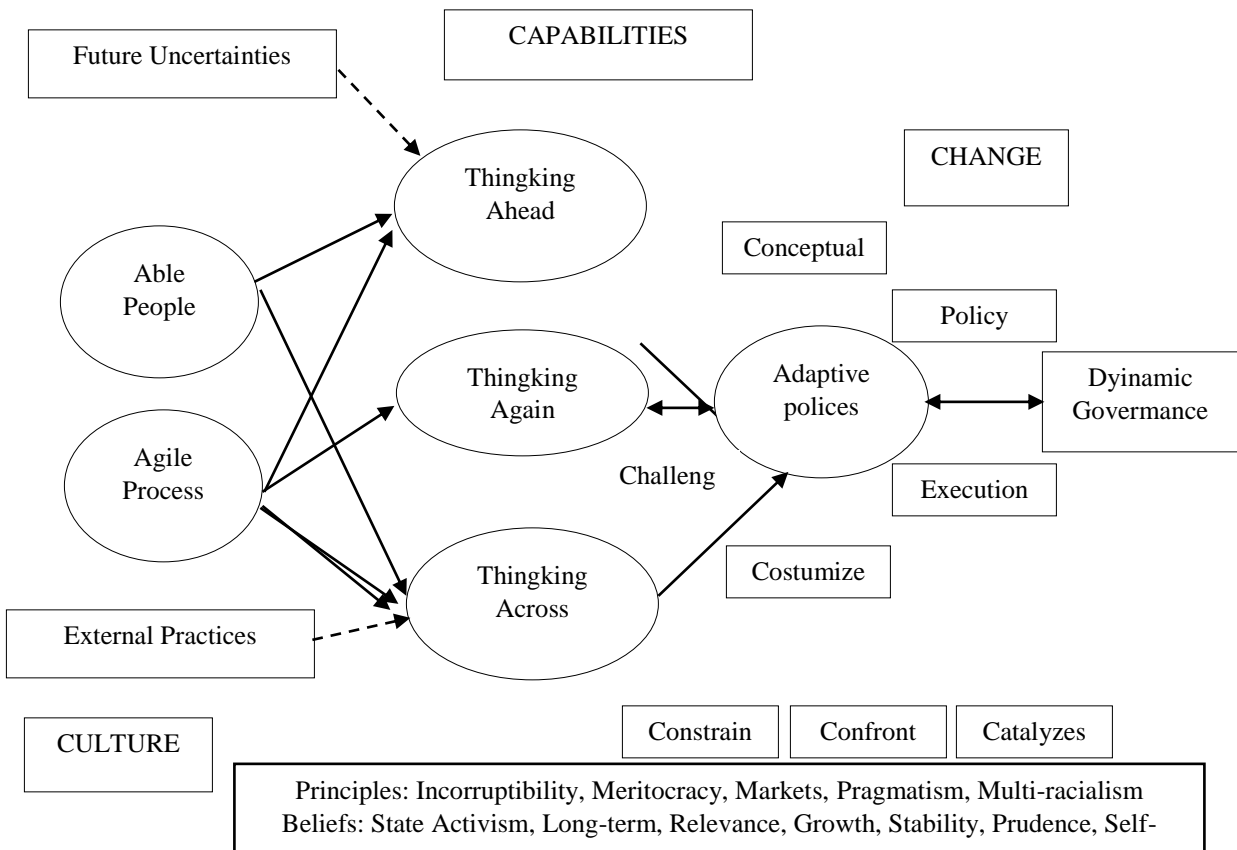
METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi BPNT bagi KPM dalam perspektif *dynamic governance* dimana proses studi kasus membutuhkan interaksi yang tidak dapat dieksplorasi dengan menggunakan instrumen survei (Merriam, 2013). Pengambilan informan dilakukan secara *purposive sampling* dan telah diperoleh delapan informan yang memiliki informasi yang terkait dengan tema penelitian dan dipelajari secara mendalam (Patton, 2002), selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data dianalisis menggunakan analisis data kualitatif sistematis sebagaimana dikemukakan oleh (Miles et al., 2014) melalui proses klasifikasi data, pemberian label dan penyusunan kategori berdasarkan pertanyaan penelitian dan transkrip wawancara untuk selanjutnya dilakukan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang masih menemui berbagai permasalahan. Hasil temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara dan penelurusan observasi menunjukkan bahwa budaya masyarakat yang masih tradisional dan antipati terhadap program-program pembangunan pemerintah, rendahnya pendidikan masyarakat dan minimnya motivasi masyarakat dalam menerima program-program pembangunan.

Untuk menganalisis implementasi BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang, kami akan menggunakan pendekatan *dynamic governance* sebagaimana dikemukakan oleh (Neo & Chen, 2007) Secara skematik pendekatan *dynamic governance* dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Kerja Sistem Dynamic Governance

Sumber : (Neo & Chen, 2007)

Pendekatan *dynamic governance* diawali dengan aspek kapabilitas dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi (*Able People*) dan kecepatan (*Agile People*). Berdasarkan hasil wawancara penelitian, implementasi BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang sudah didukung dimensi kapabilitas yaitu pelibatan masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan dukungan penuh masyarakat luas dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang terjadi sehingga dapat dikatakan kemampuan dan kecepatan berpartisipasi sudah terpenuhi. Sebagaimana dikemukakan oleh (Rifkin, 2014) bahwa partisipasi masyarakat melibatkan tindakan yang berkontribusi pada pengendalian langsung masalah yang bertujuan untuk mencapai kesesuaian dan sebagai instrumen interaksi sosial yang menjamin dukungan yang tepat dan kondusif untuk mencapai tujuan bersama sekaligus membantu masyarakat dalam mengintegrasikan keanekaragaman budaya dan memelihara sistem sosial (Firdausi, 2005). Selain itu kompetensi dan kecepatan dapat

mencakup warga negara, atau hanya perwakilan dari asosiasi atau kelompok terorganisir (Bobbio, 2019) sehingga dapat disimpulkan bahwa (*Able People*) dan kecepatan (*Agile People*) sudah terimplementasikan dengan efektif dalam implementasi BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Tata kelola *dinamyc governance* mensyaratkan dimensi lingkungan eksternal yang dinamis untuk mengantisipasi perubahan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam hal ini aspek partisipasi dalam implementasi BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang memiliki karakteristik yang berbeda karena efektifitas partisipasi tidak hanya ditentukan oleh kesadaran masyarakat akan tetapi juga ditentukan oleh kesadaran sosial ekonomi dan struktural (Júnior & Morais, 2020).

Permasalahan yang dihadapi seperti budaya masyarakat yang masih tradisional dan antipati terhadap program-program pembangunan dari pemerintah sebagian besar disebabkan kecenderungan lembaga-lembaga adat atau budaya tidak lagi mendapatkan posisi yang semestinya (Iriany & Pasciana, 2019) sehingga partisipasi masyarakat masih belum terinternalisasi dengan budaya masyarakat lokal dan berdampak pada resistensi terhadap perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Selain itu diperlukan internalisasi budaya organisasi pemerintahan dan kapabilitas organisasi pemerintahan (Sururi et al., 2020) untuk mendukung proses budaya masyarakat yang mampu mendorong model partisipasi berbasis komunitas (Rifkin, 2014) sehingga masyarakat dapat menerima program-program pemerintah yang memiliki tujuan positif melalui mobilisasi komunitas, kolaborasi, dan pemberdayaan komunitas (George et al., 2015).

Pada bagian selanjutnya, kami akan menganalisis implementasi BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang berdasarkan pendekatan *dynamic governance* meliputi tiga kemampuan kognitif yang harus dimiliki yaitu *think ahead* (kemampuan pemimpin untuk berfikir kedepan dan antisipatif), *think again* (kemampuan pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran) dan *think across* (kemampuan pemimpin yang mampu berfikir secara lateral, horizontal dan lintas disiplin).

1) Think Ahead (Kemampuan Pemimpin Untuk Berfikir Kedepan dan Antisipatif)

Sinergitas kepemimpinan dari pemerintah pusat dan daerah dalam memahami dan mengantisipasi perubahan dengan berbagai kebijakan strategis menjadi sangat penting sebagai bagian dari dimensi *think ahead*. Implementasi BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota

Serang dalam beberapa hal sudah melakukan berbagai langkah strategis seperti sosialisasi tentang program BPNT dan komunikasi persuasif terhadap masyarakat akan tetapi minimnya motivasi masyarakat untuk menjadi peserta KPM menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi. Hal ini dikarenakan implementasi BPNT belum dibarengi dengan kemampuan pemimpin untuk berfikir kedepan dan antisipatif berdasarkan pengetahuan yang dimiliki (Bennet et al., 2015), dalam hal ini kemampuan sosialisasi dan komunikasi yang sudah dilakukan perlu didukung dengan langkah antisipasi seandainya mendapatkan respon yang rendah dari. Oleh sebab itu dalam mengembangkan kemampuan berfikir kedepan dan antisipatif dibutuhkan kepemimpinan visioner yang bermuara pada dua keterampilan utama: 1) kemampuan untuk melihat sesuatu sejak dini, dan 2) kekuatan untuk menghubungkan titik-titik (Bennet et al., 2015).

2) *Think Again* (Kemampuan Pemimpin Yang Mampu Mengkaji Ulang Hasil Pemikiran).

Dimensi lingkungan terus menuntut kepemimpinan yang mampu mengkaji ulang hasil program-program. Oleh karena itu, melakukan evaluasi dan proyeksi ulang terhadap konsep dalam implementasi program BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang perlu dilakukan untuk menilai relevansi program dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang dihadapi (Meara, 2010). Dalam konteks penelitian ini, permasalahan rendahnya pendidikan masyarakat yang berdampak pada minimnya pengetahuan dan pemahaman program BPNT sehingga menghambat keberhasilan. Fakta penelitian menyebutkan bahwa masyarakat sulit sekali memahami program BPNT bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di E-Warong (Elektronik Gotong Royong) atau pedagang bahan pangan yang terdaftar memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BNI dan BTN. Oleh sebab itu mendorong pentingnya sosialisasi informasi dan teknologi kepada masyarakat (Deb, 2014) sebelum program BPNT dilaksanakan menjadi preferensi bagi kepemimpinan yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran.

3) *Think Across* (Kemampuan Pemimpin Yang Mampu Berfikir Secara Lateral, Horizontal Dan Lintas Disipin).

Dinamika setiap program pemerintah terkadang dihadapkan pada beberapa permasalahan termasuk dalam hal ini implementasi program BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Oleh sebab itu faktor kepemimpinan perlu berpikir melintasi batas negara dan domain

tradisional dalam mencari ide dan praktik menarik yang dapat mereka sesuaikan dan kontekstualisasikan dengan lingkungan domestik mereka (Neo & Chen, 2007). Permasalahan program yang bertentangan dengan budaya lokal, rendahnya pendidikan masyarakat dan respon yang minim dari masyarakat menjadi catatan penting bagi kepemimpinan untuk berfikir lateral, horizontal dan lintas disiplin.

Ketiga konsep yang telah diuraikan dapat dikolaborasikan dengan pendekatan adaptif dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi sehingga kebijakan dan keputusan dapat dilakukan untuk mewujudkan *dynamic governance*. Dan mengadaptasi argumentasi (Meara, 2010), berikut ini adalah ringkasan langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah untuk memastikan keberhasilan implementasi BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang yaitu; 1) Dukungan pemerintahan yang efektif yaitu kemampuan pemerintah untuk bekerjasama dengan masyarakat melalui forum-forum dialog terbuka dengan target-target realistis yang dapat dicapai oleh masyarakat; 2) Dukungan Kapasitas Sosial, yaitu memberdayakan masyarakat dengan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat; 3) Dukungan Public Private Partnership, yaitu pelibatan sektor swasta dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait informasi dan teknologi yang digunakan dalam program BPNT.

KESIMPULAN

Implementasi program BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam hal ini proses internalisasi budaya lokal, faktor rendahnya pendidikan dan minimnya motivasi masyarakat menjadi beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Serang.

Pendekatan *dynamic governance* menjadi preferensi kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang dalam Implementasi program BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang, hal ini dikarenakan beberapa permasalahan tersebut memiliki relevansi dengan perspektif *dynamic governance* sebagai salah satu instrumen yang diharapkan mampu memastikan faktor budaya, kapabilitas dan ketiga kemampuan kognitif menjadi lebih kuat, efektif dan berkelanjutan. Selain itu mendorong dukungan pemerintah yang efektif, kapasitas sosial dan public private partnership dapat dilakukan sebagai upaya rekomendasi kebijakan dalam program BPNT bagi KPM di Kecamatan Kasemen Kota Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspar, Sakaruddin, M., & Syakhrudin, D. N. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Washiyah*, 1(2), 305–325.
- Bennet, A., Bennet, D., & Lewis, J. (2015). Leading with the Future in Mind. In *The Routledge Companion to Management and Workplace Spirituality* (Nomor January). Mountain Quest Institute and CoHero Institute. <https://doi.org/10.4324/9781351015110-30>
- Bobbio, L. (2019). Designing effective public participation. *Policy and Society*, 38(1), 41–57. <https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1511193>
- BPS Indonesia. (2020). Profil Kemiskinan di Indonesia. In *BPS Indonesia* (Vol. 16, Nomor 02).
- Deb, S. (2014). Information Technology, Its Impact on Society and Its Future. *Advances in Computing*, 4(1), 25–29. <https://doi.org/10.5923/j.ac.20140401.07>
- Fadlurrohman, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). *Share : Social Work Journal*, 9(2), 122. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>
- Firdausi, A. (2005). People's Participation : Framework. *Asia-Pacific Business Review*, 1(June), 9–16.
- George, A. S., Mehra, V., Scott, K., & Sriram, V. (2015). Community participation in health systems research: A systematic review assessing the state of research, the nature of interventions involved and the features of engagement with communities. *PLoS ONE*, 10(10), 1–25. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141091>
- Iriany, I. S., & Pasciana, R. (2019). the Improvement of High Education Quality in Indonesia Through the Character Education. *Journal Of Educational Experts (JEE)*, 2(1), 15. <https://doi.org/10.30740/jee.v2i1p15-26>
- Júnior, J. P. B., & Morais, M. B. (2020). Community participation in the fight against COVID-19: Between utilitarianism and social justice. *Cadernos de Saude Publica*, 36(8). <https://doi.org/10.1590/0102-311X00151620>
- Lan, T. J., Soewarsono, Hadi, A., Jati, W. R., Ulya, A., Nadiroh, I. M., & Amelia, M. (2018). *Indeks Kerentanan & Profil Rumah Tangga Miskin*. LIPI Pers.
- Meara, M. O. (2010). Innovative Approaches to Housing Policy and Production in Latin America. *46th ISOCARP Congress*.

- Merriam, S. B. (2013). *Qualitative Research A Guide to Design and Implementation*. Revised and Expanded from *Qualitative Research and Case Study Application in Education*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. In *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3 ed.). SAGE Publications Inc.
- Nallari, R., & Griffith, B. (2011). *Understanding Growth and Poverty. Theory, Policy and Empirics*. In *Understanding Growth and Poverty*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6953-1>
- Neo, Boon Siong & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 5 Toh Tuck Link, Singapore 596224.
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Framework for Dynamic Governance: Institutionalizing Culture, Capabilities and Change*. In *World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd*. https://doi.org/10.1142/9789812771919_0001
- Pathony, T., & Deda, C. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 1(2), 187–205. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v1i2.743>
- Patton, M. Q. (2002). Two Decades of Developments in Qualitative Inquiry: A Personal, Experiential Perspective. *Qualitative Social Work*, 1(3), 261–283. <https://doi.org/10.1177/1473325002001003636>
- Pramesti, R., Muhammad, A. S., & Safitri, D. P. (2019). Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai melalui Elektronik Gotong Royong di Kota Tanjung Pinang. *Spirit Publik*, 14(April), 81–93.
- Rifkin, S. B. (2014). Examining the links between community participation and health outcomes: A review of the literature. *Health Policy and Planning*, 29, ii98–ii106. <https://doi.org/10.1093/heapol/czu076>
- Sururi, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. U. (2020). *Dynamic Governance dalam Implementasi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat*

- Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Serang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, October 2019*, 1–6.
- Sururi, A., Rusli, B., Widianingsih, I., & Ismanto, S. U. (2019). Dynamic Governance In The Implementation Of Un-Inhabitable Housing Development Program For Low Income Family In Serang Municipality. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 1–6.
- Tribun Banten. (2020). Melongok Kecamatan Termiskin dan Kumuh di Ibu Kota Provinsi Banten. *Tribun Banten News*. <https://banten.tribunnews.com/2020/07/17/melongok-kecamatan-termiskin-dan-kumuh-di-ibu-kota-provinsi-banten> (Diakses pada tanggal 04 Mei 2021)
- Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Reformasi*, 9(2), 138. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454>